

KAJIAN OPINI PEREMPUAN PASCA RELOKASI: STUDI PADA PEREMPUAN KALIJODO DI RUSUN PULOGEBAWANG

A Study of Women's Opinions after Relocation: Women from Kalijodo at Pulogebang Flats

Lasmery RM Girsang

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Bunda Mulia Jakarta

*Email: lasmeryrmgirsang@gmail.com

Abstract: *This study examines the opinions of women affected by the relocation of Kalijodo residents to Pulogebang Flats. Public opinion is treated as a central concept in political communication, while the analysis is limited to women's experiences as a socially marginalized group. Using a qualitative case-study approach and Muted Group Theory, data were collected through participant observation and in-depth interviews with five women who had lived in Kalijodo. The findings show that economic opportunities, residential facilities, and relations with flat management constrained the women's ability to express their aspirations.*

Keywords: Women's Opinion; Relocation; Kalijodo; Muted Group Theory; Political Communication

Abstrak: Penelitian ini mengkaji opini perempuan yang terdampak relokasi warga Kalijodo ke Rusunawa Pulogebang. Opini publik ditempatkan sebagai konsep utama dalam komunikasi politik, sedangkan analisis dibatasi pada pengalaman perempuan sebagai kelompok yang termarginalkan secara sosial. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus dan Teori Kelompok Bungkam, data dikumpulkan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam terhadap lima perempuan yang pernah menetap di Kalijodo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan ekonomi, fasilitas hunian, dan relasi dengan pengelola rusun membatasi kemampuan perempuan dalam menyampaikan aspirasi.

Kata Kunci: Opini Perempuan; Relokasi; Kalijodo; Teori Kelompok Bungkam; Komunikasi Politik

1. Pendahuluan

Dewasa ini, perempuan masih menjadi kelompok yang termarginalkan. Kenyataan tersebut juga tidak jauh berbeda dalam fenomena sosial sehari-hari. Pada kehidupan nyata— di mana kaum hawa telah banyak disibukkan dengan urusan rumah tangga—para perempuan juga turut terkena dampak dari regulasi pemerintahan setempat. Beragam upaya perbaikan dan pembenahan yang berkesinambungan dikerjakan pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta khususnya di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama sedikit banyaknya juga turut memberikan andil atas kurang berdayanya perempuan untuk menyalurkan pendapatnya. Salah satu upaya penertiban kawasan liar yang diproyeksikan sebagai lahan terbuka menjadikan warga—dan juga kaum perempuan di kawasan yang dimaksud—semakin terbatas ruang gerak, khususnya dalam menyikapi kebijakan pemerintah, termasuk warga perempuan yang dahulu menetap di kawasan Kalijodo (Jakarta Barat) dengan mayoritas berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja di sektor informal.

Pemprov DKI menilai permasalahan di kawasan Kalijodo merupakan persoalan yang melanggar aturan. Tidak sekadar pendirian bangunan liar di jalur hijau, namun terlebih lagi menjadikan bangunan ilegal tersebut sebagai kafe dan lokasi prostitusi. Kenyataan tersebut berusaha dituntaskan oleh Ahok dengan tujuan agar pelanggaran yang telah berpuluh-puluh tahun tersebut tidak terus dibiarkan terjadi. Selain itu, terdapat juga misi yang diemban Pemprov DKI, yakni memberantas PEKAT (penyakit masyarakat) atau penyakit sosial, khususnya prostitusi. Pemprov DKI dengan segala wewenang tugas yang dijalankan sepenuhnya demi kepentingan publik, tidak ‘memandang bulu’ atas publik mana yang akan menjadi target sasaran, termasuk daerah mana yang juga harus dibenahi.

Pada akhirnya, beragam pemberitaan media terkait upaya relokasi/penertiban/penggusuran di kawasan Kampung Pulo dan Kalijodo telah menarik atensi publik. Dampak besar dari pemberitaan tersebut telah ‘menyedot’ opini masyarakat. Dengan telah dihuninya kawasan tersebut oleh masyarakat selama berpuluh-puluh tahun, adalah wajar jika timbul pergolakan atau penolakan atas penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI. Upaya sosialisasi dan pemberitahuan secara bertahap yang diberikan pemerintah dirasa kurang memadai bagi masyarakat di kawasan tersebut. Hingga sampai pada waktunya, pemerintah bertindak yakni dengan melakukan penggusuran yang menurunkan pasukan keamanan dalam jumlah ribuan personil agar meminimalisir tindakan agresif dari warga yang menolak kebijakan tersebut.

Jika dilihat dari usainya tindakan penertiban tersebut, sebenarnya Pemprov DKI juga tentu menyeimbangkan kebijakan yang ditetapkan dengan upaya solutif. Warga eks-Kalijodo telah dipindahkan (direlokasi) di rusunawa (hunian rumah susun yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai bagi penghuninya). Namun tetap saja, perlu waktu yang lama bagi warga untuk beradaptasi di lingkungan yang baru dengan sistem yang baru sama sekali dengan hunian warga sebelumnya. Kehidupan yang bebas tanpa aturan sangat berbenturan dengan kondisi yang ada di lingkungan rusunawa. Hanya saja ada kemungkinan terjadi pengabaian opini publik dalam prosesnya.

2. Kajian Literatur

2.1 Teori Kelompok Bungkam

Penelitian ini berfokus pada opini kelompok perempuan. Fokus tersebut sejalan dengan Teori Kelompok Bungkam yang membahas komunikasi frustratif ketika perspektif kelompok berdaya rendah tidak memperoleh ruang yang setara (Griffin, 2012:469). Kramarae menempatkan bahasa sebagai konstruksi kelompok dominan sehingga perempuan sering harus menyesuaikan cara menyampaikan pengalaman dan aspirasinya. Griffin (2012:461) menjelaskan bahwa gagasan kelompok berdaya rendah kerap diabaikan ketika mereka berkomunikasi dalam sistem bahasa publik yang dibentuk kelompok dominan.

Ide penting dalam teori tersebut juga dapat diterjemahkan bahwa kelompok yang menyusun bagian teratas dari urutan tingkat sosial menentukan suatu sistem komunikasi bagi budaya tersebut. Kelompok dengan kekuasaan yang lebih rendah seperti wanita, kaum miskin, dan orang kulit berwarna, harus belajar untuk bekerja dalam sistem komunikasi yang telah dikembangkan oleh kelompok dominan, jadi kelompok dominan di dalam teori kelompok bungkam inilah yang mendominasi atau memegang kekuasaan. Beberapa tokoh lainnya seperti Edwin dan Shirley Ardener turut menjelaskan bahwa wanita atau anggota dari kelompok bawah mana pun memang berbicara, tetapi kata-kata mereka berjatuh pada telinga yang tuli, pada akhirnya tentu saja menjadi tidak diucapkan, yang berarti berbicara atau menyampaikan sesuatu pada kelompok dominan tidak akan mendapatkan tanggapan oleh karenanya menjadi percuma atau sia-sia.

Teori Kelompok Bungkam berangkat dari perbedaan pengalaman perempuan dan laki-laki serta dominasi laki-laki dalam pembentukan sistem komunikasi. Pengalaman kelompok dominan lebih sering dijadikan acuan, sementara pengalaman perempuan sulit memperoleh pengakuan yang setara.

Dalam kehidupan sosial, dominasi tersebut tampak ketika laki-laki lebih banyak mengendalikan keputusan dan memperoleh ruang bicara, baik dalam politik maupun rumah tangga. Kondisi ini dapat membatasi peluang perempuan untuk tampil sebagai pemimpin dan menyampaikan kepentingannya.

Pembungkaman dibentuk melalui proses sosial sejak awal kehidupan, tetapi dapat dilawan dengan mengangkat pengalaman yang sebelumnya dianggap remeh oleh kelompok dominan. Sejarah lisan, buku harian, jurnal, serta bentuk ekspresi alternatif menjadi saluran untuk menegaskan pengalaman komunikasi perempuan (Griffin, 2012:460).

2.2 Relokasi sebagai Konteks Kebijakan Publik

Program penertiban merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk menata pedagang kaki lima, bangunan di lahan pemerintah, kawasan hijau, lalu lintas, sampah, dan hunian. Dalam konteks penelitian ini, relokasi Kalijodo menjadi bagian dari kebijakan penataan hunian yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga.

Kebijakan penertiban dan relokasi tersebut berimplikasi langsung terhadap kehidupan perempuan.

2.3 Perempuan, Gender, dan Opini Publik

Istilah perempuan mengandung makna penghormatan dan digunakan untuk membicarakan kondisi serta peran perempuan dalam masyarakat. Perkembangan studi perempuan menegaskan pentingnya pengalaman perempuan sebagai dasar untuk memahami kedudukan, peran, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Perempuan akan lebih mampu menyatakan dirinya dalam lingkungan budaya yang memberikan kedudukan dan status sosial setara. Perilaku perempuan dipengaruhi oleh faktor biologis, sosialisasi, kepribadian, dan kesempatan berpartisipasi secara sosial.

Secara etimologis, opini publik berasal dari kata opini dan publik. Konsep ini mencakup pendapat pribadi, perseorangan, kelompok, dan umum. Istilah opini publik mula-mula banyak digunakan dalam konteks politik, terutama berkaitan dengan kebebasan berpendapat, ruang publik, dan propaganda. Dalam penelitian ini, opini publik dibaca dalam konstruksi komunikasi berbasis gender.

Gender tidak hanya dimaksudkan sebagai pembeda jenis kelamin, melainkan pada perbedaan peran/status sosial yang diemban. Namun, perbedaan tersebut akhirnya ‘melahirkan’ stereotip dan ketidakadilan gender. Perempuan sering mengalami pengekanan dan penindasan hingga ‘melahirkan’ beberapa aliran feminisme. Yang menjadi inti aliran feminisme adalah agar perempuan mempunyai kesetaraan (equality), termasuk dalam kepemilikan akses.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain dan Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma interpretif. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memahami masalah sosial secara menyeluruh melalui pengalaman, makna, dan pandangan rinci para informan dalam konteks alamiah (Denzin dan Lincoln, 2011:244-245).

Penelitian kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan interaktif. Peneliti menjadi instrumen kunci, sedangkan analisis data bersifat induktif dan menekankan pemaknaan daripada generalisasi (Sugiyono, 2011:8, 15).

3.2 Pendekatan Studi Kasus

Riset ini menggunakan studi kasus untuk menyelidiki pengalaman perempuan terdampak relokasi dalam latar kehidupan nyata. Keterlibatan peneliti di lapangan digunakan untuk merefleksikan dan menafsirkan makna yang muncul dari fenomena yang diamati.

Secara umum, seperti halnya pada tujuan penelitian lain, pada dasarnya peneliti yang menggunakan metode penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya.

Penelitian studi kasus adalah penelitian yang berupa penyelidikan mendalam dari berbagai macam informasi mengenai beberapa unit atau kasus untuk 1 periode atau antar beberapa periode waktu majemuk. Sebuah kasus bisa sederhana atau rumit, tergantung dari fokus peneliti. Dalam prakteknya, lama waktu yang diperlukan untuk fokus pada salah satu kasus, selama peneliti membahas kasus tersebut berarti selama itu pula telah melakukan studi kasus. Di dalam penelitian ini, studi kasus dijadikan sebagai pendekatan keilmuan untuk mengkaji kebijakan publik (opini publik) dan juga sebagai refleksi tentang pengalaman manusia (baca: para perempuan yang terkena program relokasi).

Denzin dan Lincoln (2009:301) membedakan studi kasus menjadi tiga jenis:

- a) studi kasus intrinsik;
- b) studi kasus instrumental; dan
- c) studi kasus kolektif.

Penelitian ini menerapkan studi kasus intrinsik untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman perempuan eks-Kalijodo yang direlokasi ke Rusunawa Pulogebang.

3.3 Pengumpulan Data dan Informan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan observasi (yakni participant observation) dan wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai langkah-tahapan pengumpulan data. Observasi berpartisipasi sangat diperlukan agar peneliti mendapatkan gambaran dan pemahaman yang riil dari fenomena yang diamati. Sedangkan wawancara mendalam diperlukan juga sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam konteks penelitian ini, narasumber berjumlah lima warga perempuan (ibu rumah tangga).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Profil Narasumber dan Pengalaman Relokasi

Riset ini menetapkan Mariamah sebagai narasumber utama (key informant). Ibu Mariamah telah menjadi ketua Rukun Tetangga (RT) selama puluhan tahun di Kalijodo dan juga selama menetap di Rusunawa Pulogebang (RPG). Selama menghabiskan 40 tahun lebih hidupnya di Kalijodo, Mariamah mengepalai kurang lebih 100 kepala keluarga. Sebagai orang tua tunggal berusia 58 tahun dengan empat anak dan beberapa cucu, Mariamah sudah menjadi ikon (simbol) yang kuat di kalangan warga di Kalijodo dengan perannya sebagai ketua RT selama puluhan tahun.

Narasumber dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, sederhana, ramah, bersahaja, solider dan bertoleransi menguatkan posisi dirinya sebagai seorang pemimpin yang dihormati dan disegani warganya. Melalui berbagai kesempatan dan kebersamaan yang dilalui, peneliti berusaha mengenal narasumber lebih dekat. Tanpa segan, narasumber banyak menuturkan kisah kehidupan pribadinya dan pengalaman (suka duka) selama tinggal di Kalijodo.

Memiliki rumah sederhana yang berada di pinggir jalan dan tidak berpagar, membuat masyarakat atau orang luar leluasa melintas bahkan singgah di rumah tersebut. Dikarenakan di rumah itu pulalah, Mariamah membuka usaha kecil-kecilan seperti warung, kios telepon seluler dan usaha salon. Bahkan berkat keuletannya, beliau mampu membangun empat rumah mewah sekaligus untuk diwariskan kepada empat anaknya. Akan tetapi sebelum rumah tersebut dihuni, semua bangunan di Kalijodo diluluhlantakkan seketika sebagai konsekuensi dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

Penganut nasrani ini mengisahkan getirnya kejadian yang menimpanya dan warga Kalijodo terkait relokasi pemprov DKI Jakarta di 2015 lalu. Dari lubuk hati yang terdalam, tentu tidak ada individu yang rela meninggalkan kenyamanan hidup, begitu pula dengan warga di Kalijodo. Oleh karenanya, Mariamah harus mengerahkan kemampuannya untuk meyakinkan warganya untuk bersedia pindah. Meskipun telah mendapatkan sosialisasi dari pihak aparat pemerintah, tetap saja peristiwa penggusuran tersebut dirasa mendadak dan menimbulkan trauma yang mendalam dikarenakan kehilangan seluruh harta benda yang tidak sempat dibawa.

Aspirasi Mariamah selama menghuni Rusunawa Pulogebang tergambar dalam wawancara pada 10 Maret 2017:

Tadi saya juga tidak ada ingin jadi RT. Ingin warga saya jangan ditindas. Kalau PKK ada, ya PKK saja, tetapi warga di sini banyak dan PKK terbatas. Saya ingin mengajukan langsung kepada Pak Ahok supaya warga saya tidak ada yang sakit hati. Waktu pindah, kami mau makan apa? Saya sudah ke Pak Camat. Katanya akan dipinjami modal Rp10 juta per kepala keluarga, tetapi kenyataannya tidak. Koperasi tidak meminjamkan

uang. Dulu tiap bulan saya dapat beras dan sayur dari kota, sekarang berhenti. Blok saya sepi; orang-orang berjualan ke jembatan.

Menurut narasumber, sebagian rumah warga berada di zona yang dinilai masih memungkinkan pengajuan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Namun, relokasi tetap dilakukan dan warga harus membangun kembali penghidupan mereka di lingkungan baru.

4.2 Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian

Dari hasil observasi dan wawancara langsung, peneliti turut merasakan masih banyaknya keluhan dan kebutuhan narasumber kunci setelah 1,5 tahun menetap di RPG. Bidang kehidupan yang paling menonjol adalah lapangan ekonomi untuk ‘menyambung hidup’ dengan hilangnya mata pencaharian lama di tempat lama yang tidak bisa diupayakan lagi di tempat yang baru.

4.3 Fasilitas Kesehatan dan Hunian

Fasilitas kesehatan dinilai belum lengkap karena hanya tersedia klinik kecil dengan obat generik dan pelayanan perawat. Mariamah menggambarkan kesulitan penghuni lanjut usia ketika harus menggunakan tangga serta dampak tekanan psikologis terhadap kesehatannya:

Kalau orang tua harus naik-turun tangga, napas sudah sesak. Selama di sini tekanan darah saya naik; pernah 210/100, lalu 180. Mungkin karena pikiran dan tegang. Saya takut dan harus ke klinik dengan biaya sendiri.

Keluhan serupa disampaikan Nati, informan pertama, yang telah menetap lebih dari satu tahun di Rusunawa Pulogebang.

Nati menilai ruang tamu, dua kamar tidur, kamar mandi, dan dapur terlalu sempit untuk dihuni bersama anak-anaknya, termasuk seorang anak yang telah berkeluarga dan memiliki balita. Keringanan sewa selama tiga bulan pertama membantu masa transisi, tetapi tidak menyelesaikan keterbatasan ruang hunian.

Tiap bulan, rata-rata biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 400.000, di mana Rp 254.000 untuk sewa kamar, sisanya untuk biaya air dan listrik. Dengan difasilitasi pihak pengelola tidak membayar sewa selama 3 bulan pertama di awal pindah ke RPG, sebenarnya keinginan ibu Nati adalah bisa menempati kamar yang masih kosong. Karena di blok H dihuni oleh warga eks-Kalijodo, ibu Nati merasa keberatan jika kamar kosong diberikan (disewakan) ke orang lain, sementara beliau sendiri masih membutuhkan. Demikian halnya dengan kegiatan niaga untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

4.4 Akses Usaha dan Pekerjaan

Hampir semua warga eks-Kalijodo harus kehilangan mata pencaharian. Dahulu, warga (perempuan, khususnya) bekerja di sektor informal (misalnya: kerja serabutan, membantu pekerjaan rumah tangga-cuci gosok dan berdagang). Namun semenjak menghuni RPG, ‘ruang gerak’ semakin terbatas. Tidak semua warga rusun diperbolehkan membuka ‘lapak’nya masing-masing. Pihak pengelola rusun sebenarnya telah menyediakan beberapa kios di lapangan tengah.

Keterbatasan kios dan modal mempersempit peluang warga eks-Kalijodo untuk berdagang. Nati menyampaikan:

Kami sama-sama susah. Warga yang punya modal memperoleh kantin, sedangkan warga relokasi Kalijodo justru tidak mendapatkannya. Kalau semua berjualan, pembelinya tidak ada. Saya juga tidak punya modal.

Perempuan single parent yang memiliki seorang putra yang duduk di sekolah dasar ini masih kesulitan mencari pekerjaan. Pekerjaan yang dilakoni di Kalijodo berputar di sektor informal seperti berniaga. Namun sayang, hampir dua tahun berada di Rusunawa Pulogebang, Minah tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Jika sebelumnya masih bisa meminjam dari teman—sesama warga di Kalijodo—maka sekarang hal tersebut tidak dapat dilakukan mengingat masing-masing warga juga berusaha ‘bangkit’ dari keterpurukan dan memulai kembali ‘lembaran baru’ kehidupan mereka.

Minah menggambarkan kesulitan memperoleh pekerjaan setelah relokasi:

Tidak ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan, saya jalani. Pengelola hanya menanggung tempat tinggal dan tidak menyediakan lowongan. Kalau tidak memiliki keahlian dan modal, keluar mencari pekerjaan juga sulit.

Keterbatasan pekerjaan membuat Minah dan sejumlah warga menunggak sewa. Ia pernah bekerja sementara sebagai pengasuh balita, tetapi belum memperoleh pekerjaan tetap. Lokasi kamar di lantai lima juga menambah beban mobilitas harian.

4.5 Pembungkaman dalam Relasi Pengelolaan Rusun

Dalam perspektif Teori Kelompok Bunkam, perempuan penghuni rusun belum bebas menyampaikan keinginan dan pendapatnya. Sistem komunikasi di lingkungan hunian lebih banyak ditentukan oleh pengelola dan struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki.

Kesamaan pengalaman para informan terutama tampak pada ketidakberdayaan ekonomi dan terbatasnya akses terhadap tempat usaha. Pengalaman serupa juga disampaikan Ijah, informan ketiga yang tinggal di Blok H lantai dua.

Ijah mengikuti program membuat yang diselenggarakan pengelola, tetapi program tersebut belum menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan:

Tiga bulan mengikuti program membuat, tetapi belum menghasilkan pendapatan. Di rusun lain hasil membuat sudah dihargai, sedangkan kegiatan PKK di blok kami juga belum berjalan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembungkaman tidak hanya berkaitan dengan gender, tetapi juga pekerjaan dan ketidakpopuleran pandangan yang disampaikan. Pengelola menjadi kelompok dominan, sementara kesempatan kerja di sekitar rusun lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Perempuan cenderung diarahkan pada perdagangan skala kecil dan pekerjaan domestik.

4.6 Kategorisasi Opini Perempuan

Dari keseluruhan hasil penelitian, peneliti mengkategorisasikan temuan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Kategorisasi Opini

Narasumber	Ekonomi	Fasilitas	Sosial
Narasumber utama	V	V	V
Informan 1	V	V	V
Informan 2	V	V	V
Informan 3	V	V	V
Informan 4	V	V	V

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh informan menyampaikan persoalan pada tiga ranah yang saling terkait, yaitu kesempatan ekonomi, fasilitas rusun, dan kondisi sosial. Keceragaman pengalaman tersebut memperkuat temuan mengenai terbatasnya ruang aspirasi perempuan pascarelokasi.

5. Kesimpulan

Opini perempuan yang terdampak relokasi kawasan Kalijodo menguatkan penjelasan Teori Kelompok Bungkam. Para informan belum dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka ketika program atau kebijakan pengelola tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Keterbatasan kesempatan ekonomi, fasilitas hunian, dan relasi kuasa di lingkungan rusun menempatkan perempuan pada posisi yang harus menyesuaikan diri dengan keputusan kelompok dominan.

Daftar Pustaka

- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 2011. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Griffin, Em. 2012. *A First Look at Communication Theory*. Eighth Edition. New York: McGraw-Hill.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

